

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### 2.1. Permodalan Dunia Usaha

Bagi dunia usaha permodalan merupakan faktor penting, diperlukan tidak saja pada saat pendirian dan pengembangan perusahaan, tetapi juga dalam operasional sehari-hari. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa akan bergantung pada kuantitas dan kualitas dari faktor-faktor produksi (termasuk modal) yang tersedia. Kegagalan perusahaan menyediakan modal, akan menghambat operasional perusahaan; seperti kesulitan penyediaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, serta mengganggu kepercayaan para pihak seperti supplier, kreditor, relasi dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan.

Mengingat betapa penting faktor modal dalam mendukung kegiatan usaha, sehingga masalah modal seringkali menjadi alasan lambannya pertumbuhan dunia usaha sektor riil di tanah air. Permasalahan ini, tidak saja diakui para pengusaha, juga didukung beberapa literatur dan hasil penelitian yang kemudian para ekonom, praktisi dan peneliti menjadi kontroversi menilai masalah modal sebagai faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha. Penilaian masing-masing memiliki argumentasi kuat didukung data empiris berdasarkan literatur dan hasil penelitian yang dilakukan.

Modal adalah kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. (Ibrahim, 1937). Secara fisik terdapat dua jenis modal dalam perusahaan dibedakan dengan *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). *Fixed capital* seperti gedung-gedung, mesin-mesin, pabrik-pabrik, kendaraan dan lain-lain; yaitu benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensinya tidak berkurang. Adapun *circulating capital* seperti bahan baku, uang, dan lain-lain yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. (Nasution, dkk. 2006).

Penelitian Tjahjono Anugrah (2006); tentang Faktor-Faktor Diterminan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, menghitung kembali kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, menambahkan faktor human kapital serta beberapa faktor

yang menjadi sumber fluktuasi *business cycle* di Indonesia, dengan pendekatan panel data 26 Propinsi selama periode 1985 – 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *labor* lebih besar dibandingkan *capital*, yang ditunjukkan dengan *capital share* sebesar 0,4 dan *labor share* sebesar 0,6. Dengan kata lain bahwa peranan tenaga kerja ternyata lebih besar dibanding dengan peran modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut.

Dikemukakan Sukirno (2003), bahwa hambatan-hambatan terpenting dalam mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, antara lain bahwa kebanyakan negara menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern. Bahkan menurut Bank Dunia rendahnya produktivitas dan pembentukan modal dalam masyarakat merupakan penyebab dasar dari terjadinya kemiskinan di beberapa negara berkembang. (Ismawan 2003).

Kegagalan perusahaan menyediakan modal, akan menghambat operasional perusahaan; seperti kesulitan penyediaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, serta mengganggu kepercayaan para pihak seperti *suplier*, *kreditor*, *relasi* dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. Mengingat betapa pentingnya, sehingga masalah permodalan seringkali dikeluhkan dan menjadi alasan lambannya pertumbuhan dunia usaha sektor riil di tanah air. Permasalahan ini, tidak saja diakui para pengusaha, juga didukung beberapa literatur dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berbeda dengan hasil survei World Economic Forum (WEF) yang menanyakan masalah-masalah utama yang dihadapi pengusaha dalam bisnis mereka sehari-hari. Yang menarik dari hasil survei ini, untuk kasus Indonesia adalah bahwa hanya 4,69 persen dari responden yang mengatakan bahwa kurangnya akses ke keuangan merupakan kendala utama. (Tambunan, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa permodalan bukan merupakan masalah atau kendala utama yang dihadapi mereka dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Kesimpulan ini hampir sama dengan hasil pengujian empiris data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, dengan menggunakan estimasi model Solow, menghasilkan tingkat *capital share of output* yang terlalu tinggi. Mankiw-Romer-Weil berpendapat bahwa *physical capital* kurang akurat dalam mengukur

kontribusi kapital terhadap pertumbuhan ekonomi. (Tjahjono, Endy Dwi dan Donni Fajar Anugrah, 2006)

Ditinjau dari cara terjadinya, sumber penawaran modal bagi pembiayaan dunia usaha terjadi dan berasal dari;

1. Tabungan dari subyek-subyek ekonomi,
2. Penciptaan atau kreasi uang /kredit oleh bank, dan
3. Intensifikasi dari penggunaan uang.

## 2.2. Sumber Pembiayaan Dunia Usaha

Dilihat dari sumbernya permodalan dunia usaha, dibedakan dengan sumber permodalan intern dan ekstern. Sumber permodalan intern (*internal financing*) berasal dari dana yang dihimpun melalui *internal* perusahaan sendiri, seperti modal saham (*equity*), cadangan (depresiasi), laba ditahan (*retained earning*) dan kewajiban lain (*liabilites*) yang sebelum dipenuhi. Metode pembiayaan modal sendiri (*equity financing*) pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang, yang pada saatnya harus dibayar kembali. (Riyanto, 1983).

Dalam penelitian Agung, dkk. (2001) tentang *Credit Crunch* di Indonesia, melaporkan bahwa; melemahnya penyerapan kredit perbankan pasca krisis, disebabkan perusahaan yang melakukan investasi baru sebagian besar menggunakan dana sendiri sebagai sumber pembiayaan (56%). Faktor-faktor penyebab meningkatnya penggunaan dana sendiri sebagai sumber pembiayaan utama adalah relatif tingginya suku bunga kredit, belum optimalnya penggunaan modal sendiri, prosedur kredit yang sulit dan pembatasan bank dalam penyaluran kredit. Namun demikian, walaupun mengalami penurunan, pembiayaan eksternal perusahaan masih bersumber pada kredit perbankan yaitu sekitar 24% yang terdiri dari 14% kredit modal kerja dan 10% kredit investasi. Sementara itu, pasar modal menjadi sumber pembiayaan berikutnya, yakni sekitar 6%. Sedangkan sumber

pembiayaan eksternal lainnya adalah pinjaman luar negeri (5%), obligasi(3%) dan pinjaman dari kelompok usaha sendiri (1%).

### 2.3. Peran Intermediasi Perbankan

Harian Kompas (04/07/2000) melaporkan, kondisi industri perbankan Indonesia pada saat ini, dibandingkan dengan sebelum krisis, masih sangat jauh sekali perbedaannya. Penyehatan perbankan yang sudah memakan biaya yang sangat mahal (sampai saat ini sudah mencapai Rp 549,72 triliun), ternyata belum menghasilkan kinerja perbankan seperti yang diharapkan. Tingkat rasio kredit terhadap simpanan pihak ketiga (*loan to deposit ratio*) yang mencapai 103,97 persen pada akhir tahun 1996, belum dapat dipulihkan. Bahkan pada akhir Maret 2000 hanya mencapai 32,48 persen. Ini menunjukkan bahwa *disintermediasi dana* pada industri perbankan masih berlangsung di Indonesia.

Menurut Yuda Agung, dkk. (2001), masih lambatnya pertumbuhan kredit perbankan setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada awal krisis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa proses pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun kondisi makro ekonomi khususnya moneter telah relatif membaik dibandingkan pada saat krisis, sebagaimana tercermin antara lain dari relatif rendahnya tingkat suku bunga, jumlah kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi pelumas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada tingkat sebelum krisis

Dalam sistem perekonomian modern bank memiliki fungsi dan peranan penting, tidak dapat dipisahkan dari lalulintas transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Peningkatan peranan perbankan sangat diperlukan guna mendukung pengembangan dunia usaha sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan adalah salah satu sektor kunci yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Ibarat darah dalam tubuh, kekacauan sistem

perbankan akan berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara. (Donna, 2005).

Pernyataan tersebut memperkuat hasil studi Levine (1997), King dan Levin (1993), yang menyimpulkan bahwa pengaruh perbankan tidak hanya bersifat temporer, namun berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Berkembangnya sistem perbankan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan, investasi dan efisiensi kapital.

Dikemukakan Tjahjono dan Anugrah (2006), peran perbankan yang penting ini tidak terlepas dari fungsi utama perbankan dalam alokasi *resources* secara efisien, melalui :

1. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai (*hedging*), diversifikasi, dan *pooling* resiko,
2. Alokasi *resources*,
3. Memantau kinerja manager dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan,
4. Mobilisasi dana,
5. Memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

Untuk mengukur sejauh mana peran perbankan dalam memajukan perekonomian terdapat dua variabel utama yang digunakan: *Pertama*, *Loan To Deposit Ratio/LDR* untuk bank konvensional atau *Finance to Debt Ratio/FDR* untuk perbankan syariah, yaitu rasio kredit atau pembiayaan yang disalurkan dibanding dana pihak ketiga yang dihipunnya dalam periode tertentu. Melalui FDR atau LDR dapat diketahui berapa besar kontribusi perbankan mendukung pembiayaan dunia usaha sektor riil. Idealnya, mobilisasi dana masyarakat harus harus seimbang dengan penyaluran kredit atau pembiayaan yang disalurkanannya.

*Kedua*, adalah jenis kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank. Dari profil kredit atau pembiayaan bank ini, dapat diperoleh informasi seberapa besar kontribusi sektor-sektor yang dibiayai bank terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi menyebutkan, ada tiga sektor yang menggerakkan pertumbuhan suatu daerah atau negara yakni rumah tangga (konsumsi), dunia usaha (sektor riil) dan pemerintah (investasi pemerintah). (Harian Pikiran rakyat 19/04/2005).

Dari hasil penelitian Duddy Resmana Donna (2005) berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya *Loan to Deposit Ratio (LDR)* di Propinsi DIY”, menyimpulkan bahwa kendala: Bagi nasabah bank umum dalam mengajukan kredit, adalah kelayakan usaha calon debitur (khususnya bagi debitur perusahaan). Sementara lainnya menyatakan kendala kredit adalah karakter debitur yang kurang layak dan kelengkapan administrasi yang kurang dipenuhi. Meskipun kondisi suku bunga cenderung terus menurun saat ini, jumlah tabungan (termasuk di daerah) terus meningkat, namun permintaan akan kredit (*demand for money*) masih jauh dibawah jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan.

Dengan mengambil sample BI Jawa Timur, dalam analisis Indra Fauzi menyimpulkan bahwa fungsi intermediasi perbankan khususnya di daerah, belum berjalan optimal, meski bank juga sangat berkepentingan untuk bisa menyalurkan kreditnya. Faktor yang menyebabkan kalangan perbankan "*enggan*" menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat, khususnya pengusaha kecil, patut dipertanyakan. Banyak studi yang menyatakan bahwa pengusaha di daerah sangat sulit mendapatkan kredit dari bank. Di sisi lain, dana masyarakat di perbankan daerah begitu berlimpah. (Fauzi, Kompas 22-06-2002).

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang merupakan survei triwulanan dengan jumlah responden mencapai lebih dari 2.400 perusahaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dipilih secara *purposive* dengan metode saldo bersih (*SB-net balance*). Pada Triwulan IV-2007, responden yang yatakan bahwa akses kredit ke bank relatif masih sulit ditunjukkan oleh SB sebesar -0,30% dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 19,05% responden menyatakan sulit, 62,20% menyatakan biasa dan 18,75% menyatakan mudah dalam memperoleh akses kredit ke bank. Beberapa faktor penyebab sulitnya akses kredit ke bank antara lain adalah persyaratan kredit yang terlalu rumit (30,40%), masih tingginya suku bunga kredit (28,00%), masalah ketersediaan jaminan (16,00%), dan kebijakan bank (15,20%). (Suplemen BI).

Studi literatur menunjukkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia setelah krisis tahun 1997 masih menimbulkan perdebatan di antara para ekonom (Agenor, dkk., 2000). Sebagian ekonom berpendapat bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan

oleh *credit crunch* yang menimbulkan fenomena *credit rationing* sehingga terjadi penurunan penawaran kredit oleh perbankan (*supply side constraint*). Ekonom yang lain berargumentasi bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap kredit (*demand side constraint*) sebagai konsekuensi logis terjadinya kontraksi permintaan agregate (*aggregate demand*) dan turunnya *output* setelah krisis. (Harmanta dan Mahyus, 2005).

Sebuah penelitian dari Harmanta dan Mahyus (2005) berjudul "Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis", dengan metode *switching regression* untuk mengetahui apakah penurunan kredit perbankan pasca krisis lebih disebabkan oleh penawaran kredit atau oleh permintaan kredit.

Hasil pengujian empiris menunjukkan:

1. *Pertama*, periode sepanjang krisis 1997/1998 ditandai dengan *excess demand* sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan kredit aktual yang terjadi pada periode tersebut lebih disebabkan oleh melemahnya penawaran kredit (*credit crunch*). Krisis yang terjadi berakibat pada melambatnya pertumbuhan DPK yang pada gilirannya menurunkan DPK merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.
2. *Kedua*, periode setelah krisis tahun 1999 s.d. sekarang ditandai dengan *excess supply* sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan kredit yang terjadi hingga saat ini lebih disebabkan oleh masih lemahnya permintaan kredit. merupakan konsekuensi logis dari lemahnya sisi permintaan akibat rendahnya prospek investasi.

Sedangkan terjadinya *excess supply* di pasar kredit sampai saat ini dapat dijelaskan ke dalam dua faktor; *pertama*, sudah membaiknya dan menguatnya sisi penawaran kredit oleh perbankan. Pulihnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dengan adanya program penjaminan pemerintah telah mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang pada gilirannya meningkatkan lending capacity perbankan. Selain itu, program rekapitalisasi perbankan mampu mengatasi permasalahan modal bank sehingga telah meningkatkan kemampuannya untuk menyalurkan kredit. Selanjutnya berkurangnya *non performing loan* (NPL)

juga telah meningkatkan kemampuan bank dalam memberikan kredit. *Dan kedua*, masih belum pulihnya sisi permintaan kredit oleh dunia usaha.

Saat ini terdapat dua system perbankan, yang dibedakan menjadi bank konvensional yaitu operasional bank berbasis bunga dan bank yang beroperasi berdasarkan syariah yang dalam operasionalnya mengharamkan bunga. Keberadaan keduanya memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dalam mobilisasi dana dan penyaluran pembiayaan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.3.1. Peran Bank dalam Mobilisasi Dana**

Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendanaan utama, dan ukuran kemampuan suatu bank dalam penyaluran kredit, adalah kemampuan bank menghimpun dana. Besar-kecilnya jumlah kredit yang disalurkan akan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam mobilisasi dana masyarakat, disamping permodalan bank itu sendiri. Dalam ekonomi makro, tabungan atau *saving* adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tidak digunakan untuk pembelian barang maupun jasa. Dalam istilah perbankan tabungan masyarakat yang dihimpun, dikenal sebagai dana pihak ketiga (DPK) yang dalam laporan Bank Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu; *Rekening Giro, Tabungan, Deposito Berjangka*. Dan istilah tabungan dalam pengertian ini, adalah tabungan dalam pengertian ekonomi makro yang tercakup didalamnya giro, tabungan, dan deposito berjangka sebagai variabel Dana Pihak Ketiga yang bagi dunia perbankan peranannya sangat penting dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan. Sejak Harrod dan Domar memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi pada awal dekade 1950-an, para perencana pembangunan di banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, sering menggunakan model Harrod-Domar sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan investasi untuk mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)*. Dapat terjadi jika masyarakat bisa menabung yang kemudian menggunakannya untuk membiayai investasi. Makin tinggi tingkat tabungan masyarakat, makin

tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. (Kameo, Suara Merdeka 27/07/04).

Mengingat pentingnya peranan bank dan mobilisasi tabungan, pasca krisis ekonomi pemerintah memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat di bank yang saat ini dikelola oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan UU Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi penjaminan simpanan meliputi juga simpanan di bank syariah (BS), baik bank umum, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua miliar) rupiah yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 2008. Dan penetapan suku bunga penjaminan ini biasanya diumumkan LPS secara rutin tiap bulan. LPS menetapkan tingkat suku bunga yang dianggap wajar untuk simpanan di bank yang berlaku periode 15 April 2009 sampai dengan 14 Mei 2009 adalah sebesar 7,75 % untuk simpanan dalam mata uang Rupiah dan 2,75% untuk simpanan dalam mata uang asing (USD). (*Sumber : Bank BRI*)

### **2.3.2. Faktor Diterminan Tabungan**

Berdasarkan beberapa literatur dan didukung penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tabungan dalam suatu perekonomian, antara lain; tingkat pendapatan perkapita,

1. tingkat suku bunga,
2. beban tanggungan masyarakat,
3. laju inflasi dan
4. ketidak pastian di masa yang akan datang.

Peneliti Muradoglu dan Taskin (1996) menyimpulkan peningkatan tingkat pengembalian tabungan akan meningkatkan tabungan, tetapi efek pendapatan riil lebih tingginya dari tingkat pengembalian mengakibatkan tabungan menurun. Menurut *Keynes* besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya suku buga, melainkan tergantung pada besar kecilnya pendapatan dari rumahtangga itu. Makin besar pendapatan yang diterima

oleh satu rumah tangga makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. (Sadono Sukirno, 2004).

#### **2.4. Peranan Bank dalam Pembiayaan Dunia Usaha**

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Dengan demikian wajar apabila melambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand). (Harmanta dan Mahyus - BI 2005).

Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utamanya memberikan kredit di samping memberikan jasa lain di bidang keuangan. (Bambang Riyanto, 1983). Kredit bank menduduki posisi sangat penting dalam pasar uang jangka pendek. Bank memberikan kredit *marginal* yang memungkinkan perusahaan berkembang lebih cepat dari pada yang mungkin tercapai lewat laba yang ditahan dan kredit dagang. Penolakan kredit bank sering berarti bahwa perusahaan harus memperlambat perkembangannya. (Weston- Brigham, 1985).

Menurut Tambunan (2007), keunggulan perbankan dalam bersaing dengan lembaga atau sumber pembiayaan lainnya itu ditentukan oleh dua hal utama. *Pertama*, daya saing dari produknya dalam hal ini kredit yang ditawarkan. Daya saing tersebut diukur terutama dengan lima faktor berikut: suku bunga rendah, persyaratan yang lunak, prosedur administrasi yang sederhana, pelayanan yang baik, dan lokasi yang terjangkau. *Kedua*, kapasitas produksi, dalam hal ini jumlah dana yang bisa disiapkan setiap saat sesuai kebutuhan nasabah.

Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lewat jalur perbankan terus dilakukan, tidak saja oleh pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, melalui bentuk dan tipe kredit program yang disalurkan baik melalui intermediasi bank, maupun lewat jalur lain, seperti BUMN, koperasi, LSM dan sebagainya. Menurut Tambunan (2006); usaha meningkatkan kegiatan di sektor riil dengan memperbesar kucuran kredit tidak akan bermanfaat tanpa pada waktu yang bersamaan memperhitungkan faktor-faktor determinan lainnya.

Belakangan ini, dalam rangka mempercepat pertumbuhan sektor riil, melalui Inpres No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM, pemerintah kembali mengeluarkan Kredit Program dengan Pola Penjaminan, dengan melibatkan beberapa bank umum konvensional dan syariah. Kredit Usaha Rakyat (KUR), demikian nama kredit program baru tersebut dipasarkan dengan tingkat bunga komersial, dan risiko kredit ditanggung bersama pemerintah (melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Sarana Pengembangan Usaha Indonesia (SPUI) dan bank pelaksana. Sedangkan penilaian kelayakan dan mekanisme penyaluran kredit dilaksanakan berdasarkan bank teknis dan menjadi tanggungjawab bank pelaksana program. Pembagian risiko kegagalan bayar masing-masing 70% menjadi beban pemerintah dan 30 % risiko bank pelaksana program. (Sumber Bank BRI)

#### **2.4.1. Bentuk Pembiayaan Bank**

Dalam operasionalnya bentuk pembiayaan dunia usaha melalui bank dapat dilakukan melalui berbagai cara yang dapat digunakan, antar lain :

1. *debt financing* ; di mana dana yang dipinjamkan oleh bank merupakan suatu hutang.
2. *debt-like financing*; di mana meskipun menggunakan prinsip jual beli, seperti pembiayaan bank syariah berupa *murabahah* dan *ijarah* namun pada keduanya melekat karakteristik dasar dari suatu hutang, yaitu adanya transfer penguasaan atas suatu asset kepada yang berpiutang dalam hal terjadinya *default*. dan
3. *equity financing* ; di mana dana bank ditanamkan dalam bentuk penyertaan pada suatu perusahaan atau proyek debeturnya, dengan pembagian keuntungan yang disepakati oleh bank dan debeturnya. (Tarsidin - Warjiyo, 2006)

Pada *debt financing*, konvensasi yang diberikan debitur ditentukan oleh besarnya pembiayaan dan tingkat suku bunga kredit, yang telah dipersyaratkan di muka. Sementara itu pada *debt-like financing*, konvensasi terhadap sumber pembiayaan tergantung *mark-up* atau *margin* keuntungan bank, yang juga

besarannya telah ditentukan di muka, dan tergantung pada besarnya nilai pembiayaan. Sedangkan pada *equity financing*, besaran konvensasi tidak secara langsung tergantung pada besarnya pembiayaan yang disalurkan, tapi tergantung pada besarnya *return* proyek dan *margin* bagi hasil.

Selain itu pada bank berdasarkan bunga, tidak terdapat *risk sharing* antara bank dan depositornya, mengingat bank harus membayar jumlah bunga yang telah ditetapkan tanpa harus memperhitungkan return dan risiko dari aktivitas pembiayaannya. Berbeda dengan perbankan syariah yang terdapat *risk sharing* antara bank dan depositornya, di mana risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan bank sebagian ditransmisikan ke depositornya melalui penggunaan instrumen bagi hasil pada simpanannya. (Sumber: Tarsidin dan Warjiyo - Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2006).

Dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman dalam bentuk hutang atau kredit, untuk mengevaluasi risiko kredit, para manajer kredit memperhatikan lima C dari kredit (*The Five of C's credit*): Watak (*character*), kapasitas atau kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi atau keadaan (*conditions*). (Weston- F Brigham, 1985).

Menurut penelitian Juda Agung, dkk. (2001) berjudul "*Credit Crunch* di Indonesia Setelah Krisis- Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan", yang mengkaji apakah penurunan kredit yang tajam dari sektor perbankan di Indonesia adalah akibat *credit crunch* atau disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit sebagai konsekuensi resesi. Identifikasi dilakukan dengan metode "*switching regression*" untuk memperoleh informasi apakah aktual kredit yang ada dapat dihubungkan dengan fungsi penawaran kredit ataupun permintaan kredit. dengan variabel: penawaran kredit secara riil (LS), suku bunga, rasio modal terhadap aset, dan *non performing loans (NPLs)*. Kapasitas kredit didefinisikan sebagai total pasiva dikurangi modal bank, giro wajib minimum dan kas bank.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa walaupun mengalami penurunan, pembiayaan eksternal sebagian besar perusahaan masih bersumber pada kredit perbankan, yaitu sekitar 24% yang terdiri dari 14% kredit modal kerja dan 10% kredit investasi. Sementara itu, pasar modal menjadi sumber pembiayaan berikutnya, yakni sekitar 6%. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal lainnya

adalah pinjaman luar negeri (5%), obligasi (3%) dan pinjaman dari kelompok usaha sendiri (1%).

Hasil survei ini mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan kredit. Sebagian besar perusahaan responden mengatakan bahwa persyaratan kredit perbankan semakin ketat yang tercermin dari rendahnya fleksibilitas perbankan dalam negosiasi agunan dan suku bunga. Disamping itu, perusahaan responden yang mengalami kesulitan memperoleh kredit mengatakan bahwa faktor-faktor penawaran seperti pembatasan kredit dari bank, agunan yang tidak mencukupi serta *cash flow* perusahaan yang memburuk menjadi faktor yang menghambat akses kredit tersebut. (Agung dkk. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia. 2001).

#### **2.4.2. Ratio Kredit Vs Mobilisasi Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Membaiknya kondisi makro ekonomi khususnya moneter dibandingkan pada masa krisis masih belum dapat mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara normal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lambatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Demikian menurut penelitian Agung (2001), bahwa pertumbuhan kredit yang lambat tersebut ditengarai lebih disebabkan faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering disebut sebagai fenomena *credit crunch*.

Menurut Fauzi, (2002), rendahnya LDR juga mencerminkan terjadinya arus dana keluar (*cash outflow*) dari suatu daerah ke daerah lain yang mempunyai potensi ekonomi lebih besar. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal tersebut, adalah ;

1. Kebijakan moneter yang cenderung masih kontraktif yang ditunjukkan dengan suku bunga. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang masih tinggi. Hal ini menyebabkan perbankan lebih suka menempatkan dananya pada portofolio karena relatif bebas risiko (*risk free*) dibandingkan menyalurkan dalam bentuk kredit.
2. Penempatan obligasi pada beberapa bank yang direkapitulasi membuat bank kurang agresif menyalurkan kredit karena adanya pendapatan dari bunga obligasi tersebut.

3. Kurangnya potensi ekonomi daerah yang layak untuk diberi kucuran kredit, baik secara riil maupun teknis perbankan (kurangnya pemahaman prosedur pengajuan kredit).
4. Terbatasnya jaminan (collateral) yang dimiliki masyarakat dalam mengajukan kredit. Sebagian besar aset yang dimiliki masyarakat di daerah adalah tanah, di sisi lain status hukum tanah masih banyak berupa petok (bukan sertifikat), sedangkan nilai jaminan tanah *petok* relatif rendah dibandingkan tanah yang sudah bersertifikat.

Donna (2005) dalam penelitian berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Loan to Deposit Ratio di Propinsi DIY”, melakukan penelitian di Propinsi DIY dan memperoleh gambaran beberapa kendala dalam penyaluran kredit bank, baik dilihat dari sisi nasabah bank yang mengajukan kredit maupun dari sisi bank itu sendiri:

1. *Dari sisi nasabah*, faktor utama yang menjadi kendala dalam meminjam uang di bank umum adalah faktor alternatif meminjam, faktor budaya dan faktor pelayanan. Faktor alternatif meminjam terdiri dari variabel lebih suka meminjam uang di tempat lain dan takut meminjam uang di bank. Faktor pelayanan dipengaruhi oleh persepsi nasabah terhadap pelayanan bank umum; yaitu prosedur pengajuan kredit yang sulit, waktu pengurusan kredit yang lama, waktu pencairan kredit yang lama, dana kredit yang ditawarkan terbatas dan pelayanan pegawai bank yang berbelit-belit.
2. *Dari sisi perbankan*, kendala bagi nasabah bank umum dalam mengajukan kredit adalah kendala kelayakan usaha, karakter debitur dan kelengkapan administrasi. Lebih dari separuh responden menyatakan kendala utama penyaluran kredit adalah kelayakan usaha calon debitur (khususnya bagi debitur perusahaan). Sementara lainnya menyatakan kendala kredit adalah karakter debitur yang kurang layak dan kelengkapan administrasi yang kurang dipenuhi.

Kesimpulan ini sama dengan yang dikemukakan Tambunan (2007), bahwa memang penyebab utama dari merosotnya peran perbankan di dalam pendanaan investasi di sektor riil (atau ekonomi pada umumnya) bisa bersumber dari dua pihak: *pihak perbankan*, karena lebih suka memberi kredit konsumen dari pada

kredit usaha (investasi atau modal kerja). Atau *pihak pengusaha*, karena tidak banyak kegiatan investasi atau kegiatan produksi dibawah kapasitas terpasang sehingga tidak banyak permintaan terhadap kredit investasi atau modal kerja. Tambunan menilai, bahwa sedikitnya kredit yang disalurkan perbankan ke sektor riil selama ini bisa juga disebabkan oleh tidak adanya permintaan kredit dari dunia usaha.

Hal ini bisa karena dua penyebab: tidak ada pertumbuhan kegiatan ekonomi atau tidak ada rencana investasi yang besar sehingga membutuhkan dana pinjaman dari perbankan atau pengusaha lebih suka mencari dana dari sumber-sumber alternatif seperti misalnya obligasi atau saham karena lebih menguntungkan atau karena di mata pengusaha sektor perbankan nasional belum baik, atau aksesnya sulit.

Investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2004). mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran atau penanaman-penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sekelompok masyarakat yang melakukan pembelian saham, tidak dipandang sebagai investasi, menabung untuk membeli saham atau tanah dan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha, menurut Sadono Sukirno, bukan termasuk investasi dalam pengertian ekonomi makro. Karena investasi dalam pengertian ini penambahan jumlah barang modal yang memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Apabila ukuran keberhasilan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan ratio kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah tabungan masyarakat yang berhasil dihimpunnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terlihat bahwa perbankan syariah memiliki keunggulan dengan tingkat FDR rata-rata hampir mencapai 100% atau lebih tinggi dibanding dengan LDR perbankan konvensional. Namun demikian *market share* perbankan syariah masih sangat kecil, sehingga kontribusinya terhadap peran perbankan nasional juga kecil sekali.

Dengan diterbitkannya, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang lebih memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang *impresif*, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).)

Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan dunia usaha. Kekurangan investasi sering dikatakan sebagai salasatu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi (Sukirno, 2004). Apabila dikaitkan dengan besarnya potensi tabungan masyarakat yang tidak terserap dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dunia usaha, maka besarnya jumlah tabungan masyarakat tidak memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Karim (2002); “Apalah artinya tabungan bila tidak diinvestasikan. Ia hanya seonggok harta yang tidak berguna. Islam tidak menyukai adanya penimbunan harta yang sia-sia ini”.

## 2.5. Suku Bunga

Sebelum seseorang atau perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau menabung, mereka akan bertanya tentang bunga untuk mempertibangkan tingkat bunga saat ini, dan prediksi terhadap *trend* tingkat bunga yang akan datang. Secara umum, bahwa faktor-faktor penting yang menentukan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Suplai dana dari para penabung, terutama sektor rumah tangga.
2. Permintaan terhadap dana dari sektor bisnis untuk keperluan pembiayaan investasi.
3. Penawaran dan permintaan bersih pemerintah terhadap dana yang terlihat dari tindakan-tindakan bank sentral.

Ketiga faktor tersebut merupakan *variabel* yang menentukan besaran suku bunga riil (*real interest rate*) yang akan terjadi dalam suatu perekonomian.

Sedangkan suku bunga nominal (*nominal interest rate*), adalah suku bunga yang sebenarnya kita lihat, yaitu bunga riil ditambah dengan tingkat inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi kedepan. Dengan demikian *faktor keempat* yang mempengaruhi suku bunga adalah tingkat inflasi yang diharapkan. (Bodie,dkk, 2006)

Dalam pandangan konvensional investasi yang dilakukan suatu perekonomian akan seimbang dengan kemampuan menyediakan tabungan dalam perekonomian tersebut. Para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan suku bunga akan membawa keseimbangan antara tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan investasi yang akan dilakukan pengusaha. Setiap perubahan suku bunga akan cenderung menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan suku bunga akan terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai (Sukirno,2004).

### **2.5.1. Pengaruh Bunga terhadap Mobilisasi Dana**

Tingkat suku bunga (*interest rate*) sebagai variabel penting yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung, dan pengaruh dari tingginya tingkat suku bunga menurut sebagian ekonom, sebagai penyebab lemahnya penyaluran kredit perbankan, walaupun sebagian yang lain tidak memercayainya. Dalam teori permintaan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengelola uang tunai riilnya. (Karim, 2002)

Soediyono dalam Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, (1981) mengemukakan bahwa banyak faktor-faktor yang menentukan besaran pengeluaran investasi suatu masyarakat. Dua diantara faktor-faktor tersebut yang oleh para pemikir ekonomi dianggap sangat penting yang oleh karenanya dalam literatur banyak dibahas ialah : (a) tingkat bunga dan (b) tingkat pendapatan Nasional. Dengan singkat dapatlah dikatakan bahwa dengan tetap mendasarkan pada *ceteris paribus*, pengeluaran investasi suatu masyarakat akan bertambah apabila: tingkat bunga menurun, penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dalam masyarakat tersebut bermunculan, jumlah penduduk yang

meningkat, meluasnya pasar hasil penjualan produksi masyarakat tersebut, suasana perusahaan yang bertambah optimis. (Soediyono, 1981).

Arrieta (1988) dalam studinya menyimpulkan bahwa tingkat bunga berpengaruh positif terhadap tabungan nasional. Dari penelitian Agung (2001) menyimpulkan bahwa suku bunga sebagai determinan tabungan menunjukkan hasil yang berbeda antar daerah untuk beberapa propinsi di Indonesia. Tingkat suku bunga berpengaruh positif secara nasional baik untuk daerah penghasil migas maupun bukan penghasil migas, walaupun dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Tetapi pengaruh dari tingkat suku bunga ini tergolong rendah. Rendahnya pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kendala likuiditas dan sektor perbankan yang kurang efisien. Keterbatasan likuiditas ini terjadi karena sebagian besar pendapatan yang dimiliki masyarakat habis dipakai untuk konsumsi. Akibatnya meskipun terjadi perubahan tingkat bunga, tidak akan berarti apa-apa terhadap porsi yang dialokasikan untuk tabungan.

### **2.5.2. Pengaruh Bunga terhadap Pembiayaan Dunia Usaha**

Menurut Smith dan Ricardo, bunga merupakan konvensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada peminjam sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. “Bila hasil yang diperoleh dari pemanfaatan uang, hasilnya juga dapat diberikan atas penggunaannya”. Juga diungkapkan A.Lenner (1938) bahwa tingkat bunga adalah harga yang menyamakan penawaran kredit atau tabungan ditambah dengan kenaikan bersih tambahan uang dalam satu periode tertentu dan permintaan kredit atau investasi ditambah uang kas netto (*net hoarding*) dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut Keynes bunga bukan sebagai balas jasa atas tabungan atau pengeluaran, akan tetapi pembayaran untuk pinjaman uang. Ini merupakan balas jasa untuk tidak menahan uang (*not hoarding*) atau balas jasa atas partisipasi uang (*hoarding*) dalam bentuk likuid selama jangka waktu tertentu. Kedua ekonom berpendapat bahwa akumulasi capital uang sebagai akibat dari penghematan, penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau

perangsang tabungan. Teori-teori ekonomi makro modern memandang bahwa peran utama dari tingkat bunga adalah menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan uang (Metwally, 1995).

Dari Resume Hasil Penelitian berjudul: “Analisis Respon Suku Bunga dan Kredit Bank di Sumatera Selatan terhadap Kebijakan Moneter Bank Indonesia”, dalam Suplemen BI (Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2007). Bertujuan untuk mengetahui respon suku bunga dan kredit perbankan di Sumatera Selatan terhadap kebijakan moneter. Untuk mengukur transmisi respon kebijakan moneter ke suku bunga perbankan adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 1 bulan yang dianggap sebagai suku bunga kebijakan.

Hasil-hasil pengujian empiris disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum, perubahan atau pergerakan suku bunga SBI direspon cukup simetris oleh pergerakan suku bunga deposito. Pada umumnya besarnya respon bank pada saat SBI turun lebih besar daripada ketika SBI naik.
2. Secara umum, respon kredit terhadap pergerakan suku bunga SBI lebih kaku dan asimetris daripada respon suku bunga deposito. Di antara suku bunga kredit, suku bunga kredit modal kerja paling responsif dan simetris dibandingkan dengan suku bunga kredit konsumsi dan modal investasi. Respon kredit konsumsi paling tidak simetris dibandingkan suku bunga kredit lainnya. Pada umumnya besarnya respon bank pada saat SBI turun lebih besar daripada ketika SBI naik.
3. Karakteristik bank menentukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal kredit modal kerja, bank berasset besar dan kecil lebih responsif dibandingkan bank berasset sedang. Namun pada kredit konsumsi, bank berasset besar kurang responsif dibandingkan dengan bank berasset sedang dan kecil. Sama seperti suku bunga kredit konsumsi, respon kredit investasi cenderung asimetris.
  - b. Besarnya kredit nominal yang disalurkan oleh perbankan di Sumsel secara signifikan dipengaruhi oleh PDRB riil, inflasi, dan suku bunga SBI. Secara umum pengaruh PDRB lebih kuat dibandingkan pengaruh SBI dan inflasi. Karakteristik bank yakni asset dan likuiditas menentukan

besar dan cepatnya respon terhadap tiga variabel independen dimaksud. Secara umum bank berasset besar dan sedang responnya lebih cepat dan daripada bank berasset dan berlikuiditas kecil. (Suplemen BI)

### 2.5.3. Kontroversi tentang Bunga

Menurut Keynes pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan nasional sangat kompleks serta banyak kemungkinan yang akan terjadi. Di samping itu juga membutuhkan *lag* yang cukup lama (Mikesell&Zinser, 1973) sebagaimana dikutip Agung (2001). Muradoglu dan Taskin (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa efek tingkat bunga dapat dijelaskan dari keputusan konsumsi intertemporer. Peningkatan tingkat pengembalian tabungan akan meningkatkan tabungan tetapi efek pendapatan riil dari lebih tingginya tingkat pengembalian, mengakibatkan tabungan menurun. Demikian juga, Ekonom Keynes tidak yakin bahwa suku bunga bukan yang menentukan tinggi rendahnya investasi, walaupun bunga memegang peranan cukup penting dalam pertimbangan untuk melakukan investasi, namun juga ditentukan oleh beberapa faktor lain, seperti : Keadaan ekonomi masa kini. Ramalan perkembangan masa depan. Luasnya teknologi yang berlaku. (Sukirno, 2004).

Suku bunga bank Indonesia (*BI Rate*), merupakan instrumen pokok untuk analisis kondisi moneter nasional yang diciptakan Bank Indonesia menjadi parameter yang selalu disimak para ekonom dan analis. Penurunan suku bunga BI Rate dapat dipandang sebagai gejala positif bagi perekonomian nasional dengan harapan akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, yang pada gilirannya akan melahirkan sentimen positif dari kalangan dunia usaha sektor riil.

Namun ketika penurunan suku bunga terus berlangsung saat ini, terlihat adanya ketidak sinkronan antara sektor moneter dan fakta yang terjadi di sektor riil, dimana laju pertumbuhan sektor moneter bergerak lebih cepat sedangkan sektor riil pertumbuhannya sangat lamban. Menurut sebagian pengamat menunjukkan bahwa deregulasi perbankan belum mampu menggerakkan roda dunia usaha sektor riil, membuktikan bahwa persoalan yang dihadapi sektor riil, bukan semata-mata faktor permodalan yang erat kaitannya dengan pergerakan suku bunga. Persoalan dunia usaha, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

nonekonomi, seperti kepastian hukum, kemudahan perizinan usaha, serta faktor politik dan keamanan, yang semuanya berujung pada baik atau tidaknya iklim dunia usaha di tanah air.

Menurut Adiwarmanto Karim bahwa regulasi yang dicirikan dengan memainkan peranan suku bunga dalam sektor makro telah menggiring permintaan uang kepada pemenuhan kebutuhan yang kurang perlu, investasi yang kurang produktif, dan tindakan spekulasi. Upaya regulasi dengan memainkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan uang, justru mengakibatkan penyalahgunaan sumber dana untuk tujuan yang tidak produktif. (Karim, 2002).

Analisis ekonometri yang dilakukan Metwally (1995), menunjukkan bahwa tingkat bunga memainkan peranan penting dalam penetapan permintaan uang dinegara-negara non muslim, tetapi tidak menjadi *faktor signifikan* bagi permintaan uang dinegara-negara Islam yang mempunyai struktur ekonomi yang sama. Hasil *regresi* menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak mempunyai peran penting yang signifikan dalam penetapan permintaan uang atau permintaan investasi dinegara-negara Islam yang diteliti. Namun dengan model regresi yang sama menunjukkan bahwa tingkat bunga merupakan determinan yang signifikan bagi negara-negara non muslim yang mempunyai struktur ekonomi yang sama serta tingkat kemajuan yang sebanding. (Metwally, 1995). Hal ini menunjukkan adanya dua karakteristik yang berbeda dalam merespon perubahan suku bunga.

Dari hasil penelitian Agung dkk (2001) diperoleh indikasi bahwa suku bunga tidak dijadikan faktor utama oleh bank dalam melakukan persetujuan kredit. Meskipun debitur bersedia membayar suku bunga dan agunan yang lebih tinggi, bank tidak bersedia memberikan persetujuan kredit. Hal ini mencerminkan adanya *non-price credit rationing* dalam dunia perbankan. Oleh sebab itu, kurangnya informasi baik mengenai debitur maupun sektor yang *feasible* menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa penyaluran kredit bank masih relatif lambat.

Menurut Metwally, Ada dan tidaknya bunga, tabungan tetap akan terbentuk, dengan alasan;

1. *Pertama*, tidak setiap penabung meminjamkan tabungannya. Karena itulah tabungan dapat saja terjadi walau tanpa bunga.

2. *Kedua*, seseorang dapat menerima bunga dengan meminjamkan uang (misalnya uang warisan), bukan berasal dari tabungan.
3. *Ketiga*, Sebagian besar tabungan dalam masyarakat modern berasal dari tabungan perusahaan, bukan dari penghematan.
4. *Terakhir*, bank tidak melakukan pengorbanan apapun waktu menciptakan uang dan meminjamkan uang. (Metwally, 1995)

## 2.6. Tabungan Investasi dan Bunga dalam Perspektif Islam

Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendanaan utama, dan ukuran kemampuan suatu bank dalam penyaluran kredit, adalah kemampuan bank menghimpun dana. Besar-kecilnya jumlah kredit yang disalurkan akan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam mobilisasi dana masyarakat, disamping permodalan bank itu sendiri. Dalam ekonomi makro, *tabungan atau saving* adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tidak digunakan untuk pembelian barang maupun jasa. Dalam istilah perbankan tabungan masyarakat yang dihimpun, dikenal sebagai dana pihak ketiga (DPK) yang dalam laporan Bank Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu; *Rekening Giro, Tabungan, Deposito Berjangka*.

Dalam Islam, kegiatan menabung adalah kegiatan mulia dan sangat dianjurkan sebagai persiapan hari esok yang tidak pasti.

بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِعَدِّ قَدَمَتِ مَا نَفْسٌ وَلَتَنْظُرَ اللَّهُ اتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:18).

Secara ekonomis, persiapan masa depan dapat dilakukan dengan menabung. Menabung adalah aktivitas mencadangkan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak di masa yang akan datang. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan, “*Tahanlah sebagian hartamu untuk masa depanmu, hal itu lebih baik bagimu*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud, Turmidzi dan Nasa'i) (Muhammad, 2007). Menabung dalam Islam bukan anjuran untuk menghimpun atau menumpuk kekayaan. Tabungan dalam Islam harus dikerahkan untuk kegiatan usaha produktif sehingga tabungan dapat berkembang (beredar) dan memberi manfaat bagi banyak pihak. Secara makro, manfaat besaran tabungan yang tersedia dalam suatu perekonomian bukan jaminan kemakmuran ekonomi suatu Negara.

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif Negara tersebut. Namun, bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada gunanya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Negara yang mampu mengekspor adalah Negara yang mampu memproduksi lebih besar daripada tuntutan kebutuhan domestiknya, sekaligus lebih efisien dalam memproduksi. (Karim, 2002)

Islam memberikan dua alternative bagi pemilik asset, termasuk tabungan, untuk dikerahkan dalam kegiatan produktif atau didiamkan saja dengan konsekuensi membayar zakat pada *khaul* dan *nishab* yang ditentukan sehingga semakin lama akan berkurang. Jika pemilik asset tidak mampu mengelolanya secara produktif, ia harus mencari partner kerjasama dengan pihak lain sehingga satu sama lain saling memberi dan menerima manfaat dari asset tersebut; seperti melakukan kerjasama melalui investasi dengan pola *mudharabah*, *musyarakah*, dan bentuk kerjasama lainnya baik secara individu maupun kelembagaan.

Kegiatan investasi menurut Tandelilin, sebagaimana dikutip Huda (2007), diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Adapun keuntungan yang diharapkan dari kegiatan dari kegiatan menabung dan investasi adalah berupa pembagian hasil dari kegiatan tersebut. Pembagian hasil dapat dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati bersama sebelumnya. Selain itu, kedua belah pihak turut serta menanggung risiko yang memungkinkan timbul kerugian.

Dengan demikian, fungsi investasi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan fungsi investasi ekonomi non Islam. Perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Investasi di Negara penganut ekonomi Islam diengaruhi oleh tiga faktor: 1) Ada sanksi untuk pemegang asset kurang/ tidak produktif (*hoarding idle assets*), 2) Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan sesgala macam judi, 3) Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman adalah nol.

Oleh karena itu seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu:

1. Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*),
2. Memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito bank, pinjaman real estate, permata, atau,
3. Menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan capital nasional). (Metwally, 1995)

Firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا<sup>ع</sup> الدُّنْيَا<sup>ا</sup> الْحَيٰوةَ فِي مَعِيَشَتِهِمْ<sup>م</sup> بَيْنَهُمْ فَسَمْنَا<sup>ا</sup> نَحْنُ<sup>ن</sup> رَبِّكَ رَحْمَتَ يَفْسِمُونَ<sup>ا</sup> اٰهْمٌ  
تَجْمَعُونَ<sup>ا</sup> مِمَّا حَيْرَ رَبِّكَ<sup>ا</sup> وَرَحْمَتٌ<sup>ا</sup> سُخْرِيًّا<sup>ا</sup> بَعْضًا<sup>ا</sup> بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ<sup>ا</sup> دَرَجَاتٍ<sup>ا</sup> بَعْضٍ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS.Az Zukhruf:32)*

Berdasarkan ayat tersebut, manusia diciptakan Allah dalam berbagai ragam penghidupan profesi dan keadaan yang berbeda-beda agar satu sama lain saling memenuhi, saling membantu, saling memberi dan menerima manfaat bagi yang lainnya. Sebagai makhluk social, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Kerjasama antar pemilik sumberdaya yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan. Ayat ini pun tercermin dalam system demokrasi ekonomi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan."

## 2.7. Rangkuman Penelitian Sebelumnya

Rangkuman penelitian sebelumnya:

- 1 Nama : Endy Dwi Tjahjono dan Donni Fajar Anugrah (2006)  
 Judul Penelitian : Diterminan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
 Metode/ model/ variable : Regresi: capital, labor  
 Kesimpulan : Peran labor lebih besar dibandingkan kapital, yang ditunjukkan dengan *capital share* sebesar 0,4 dan *labor share* sebesar 0,6.
  
- 2 Nama : Taufik Kurniawan (2004)  
 Judul Penelitian : Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman di Tahun 1983 – 2002  
 Metode/ model/ variable : Regresi Linier  
 Variabel :  
 1. Faktor eksternal: SIBOR  
 2. Faktor internal : JUB , Inflasi  
 3. SBI  
 4. PDB, Suku Bunga, Pinjaman Domestik  
 Kesimpulan :  
**1. Tingkat SIBOR**  
 Dalam jangka pendek bersifat *inelastic* terhadap tingkat bunga pinjaman. dalam jangka panjang terjadi hubungan terbalik  
**2. Jumlah uang beredar**  
 Dlm jangka panjang terjadi hubungan terbalik.  
**3 . Inflasi**  
 Dalam jangka panjang, bersifat *inelastic*.  
**4. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia**

Jangka pendek, pengaruh variabel ini bersifat *inelastic* terhadap tingkat bunga pinjaman. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kecenderungan tingginya suku bunga SBI akan diikuti oleh naiknya tingkat bunga simpanan dan otomatis meningkatkan bunga pinjaman.

- 3 Nama :Harmanta, ME - Dr. Mahyus Ekananda  
 Judul Penelitian: Disintermediasi Fungsi perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997  
 Metode/ model/ variable : Metode switching regression  
 Kesimpulan :*Pertama*, periode sepanjang krisis 1997/1998 disebabkan oleh melemahnya penawaran kredit  
*Kedua*, periode setelah krisis tahun 1999 s.d. sekarang disebabkan lemahnya permintaan kredit oleh perbankan. *Kedua*, masih belum pulihnya sisi permintaan kredit oleh dunia usaha
- 4 Nama :Duddy Roesmara Donna. (2005)  
 Judul Penelitian :Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Loan to Deposit Ratio di Propinsi DIY  
 Metode/ model/ variable :Metode : Kuesioner  
 Variabel Suku bunga, Agunan, Pelayanan. Budaya, dan alternatif Pinjaman  
 Kesimpulan :*Pertama*, dari hasil analisis faktor menunjukkan agunan tidak masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk meminjam.  
*Kedua*, masalah utama mengapa minat konsumen untuk meminjam di bank rendah adalah adanya alternatif meminjam, lamanya proses dalam mendapatkan pinjaman. Faktor Suku Bunga.

- 5 Nama : Indra Darmawan (2006)
- Judul Penelitian : Perilaku Tabungan Masyarakat Antar Daerah di Indonesia
- Metode/ model/ variable : Metode Penelitian: Analisis Deskriptif
- Variabel : Tabungan, Suku Bunga, Beban Tanggungan, Inflasi Propinsi
- Kesimpulan :
- 1.a. Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.
  - 1.b. Angka beban tanggungan penduduk usia muda dan tua (*young-age and old-age dependency ratio*) dan laju inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.
  2. Ada perbedaan perilaku dalam hal tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.
- 6 Nama : Yuda Agung, dkk (2001)
- Judul Penelitian : Credit Crunch di Indonesia
- Metode/ model/ variable : Metode switching regression
- Variabel : Tingkat Pendapatan, Tabungan, Suku Bunga , Inflasi,
- Kesimpulan :
1. Tingkat pendapatan masyarakat berdampak positif terhadap tingkat tabungan di seluruh wilayah di Indonesia.
  2. Tingkat suku bunga deposito riil tahunan mempunyai dampak positif terhadap tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

3. Faktor demografi yang diwakili oleh beban tanggungan memberikan pengaruh negatif .
4. Faktor inflasi mempunyai dampak positif di beberapa daerah.
5. Terjadi variasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat atau terdapat perbedaan perilaku tabungan masyarakat antar antar daerah di Indonesia.

7	Nama	: Tarsidin, Perry Warjiyo (2006)
	Judul Penelitian	:Perbankan syariah dan Perbankan Berdasarkan Bunga : Manakah yang Lebih Optimal ?
	Metode/ model/ variable	: Metode : Uji optimalitas
	Variabel	:Pembiayaan, pendanaan, biaya operasional, <i>Wealth</i> pemegang saham, depositor, entrepreneur. Bank Syariah, bank dan berdasarkan bunga.
	Kesimpulan	:Berdasarkan analisis atas ROE, <i>wealth</i> pemegang saham bank perbankan berdasarkan bunga lebih optimal daripada perbankan syariah. Berdasarkan analisis COF entrepreneur dan volume pembiayaan bank, dari sisi welfare entrepreneur perbankan syariah lebih optimal bagi entrepreneur dibandingkan perbankan berdasarkan bunga. Berdasarkan analisis atas level return dan risiko depositor dan volume pendanaan bank, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi welfare depositor perbankan berdasarkan bunga lebih optimal bagi depositor dibandingkan perbankan syariah.